

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang peneliti lakukan terhadap Penerapan *E-Government* dalam Perizinan Penyelenggaraan Pos melalui Sistem Informasi Manajemen (SIPPPDIHATI) Direktorat Pos, Kominfo Jakarta Pusat, kesimpulan yang dapat peneliti ambil yaitu penerapan *e-government* dalam perizinan penyelenggaraan pos telah mencapai Sistem Informasi Manajemen berdasarkan teori manfaat penerapan *e-government* menurut Al Gore dan Tony Blair berdasarkan hasil penelitian yang peneliti temukan, diantaranya:

##### 1. **Memperbaiki kualitas pelayanan**

Berdasarkan dimensi memperbaiki kualitas pelayanan, penerapan *e-government* pada perizinan penyelenggaraan pos (Direktorat Pos, Kominfo Jakarta Pusat) dapat dibidang telah bekerja keras melalui optimalisasi situs pelayanan, melakukan mitigasi kendala yang dihadapi serta secara cerdas menciptakan perubahan pada perizinan manual ke *e-licensing* sehingga tercipta digitalisasi perizinan yang terintegrasi oleh berbagai lembaga, yaitu OSS.

## **2. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas**

Berdasarkan dimensi meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas, dalam permohonan izin penyelenggaraan pos (Direktorat Pos, Kominfo Jakarta Pusat) dilakukan melalui platform SIPPPDIHATI, dimana dalam tahapan yang dilalui pemohon penyelenggara pos dapat diakses melalui media tersebut, serta melakukan aduan secara langsung melalui kontak yang tersedia.

## **3. Memberdayakan mitra pemerintah**

Berdasarkan dimensi memberdayakan masyarakat, perizinan penyelenggaraan pos (Direktorat Pos, Kominfo Jakarta Pusat), pemerintah memberikan masyarakat wewenang untuk dapat berpartisipasi melalui platform yang disediakan dan dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat dari berbagai kalangan, untuk bisa mengajukan kendala dan saran hingga secara langsung melalui pertemuan terbuka antara Direktorat Pos dan Penyelenggara Pos. Serta melalui platform online, seperti halnya melalui *e-survey*.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini, peneliti memberikan saran mengenai Penerapan *E-Government* dalam Perizinan

Penyelenggaraan Pos melalui Sistem Informasi Manajemen (SIPPPDIHATI)

Direktorat Pos, Kominfo Jakarta Pusat, sebagai berikut:

#### A. Saran Praktis

1. Kepada Direktorat Pos, dan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika agar segera mengoptimalkan pendapatan

negara dari perizinan penyelenggaraan pos dan informatika dengan mencari peluang pendapatan baru dan bekerja sama dengan Kementerian Keuangan serta lembaga yang berwenang lainnya. Memberikan informasi terbaru laporan tahunan secara berkala yang paling terkini, serta memberi informasi lebih kepada masyarakat tentang industri pos pada website atau akun resmi keduanya.

2. Kepada masyarakat dan penyelenggara pos agar memberikan saran dan masukan kepada Direktorat Pos dan Direktorat Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika atas kendala-kendala yang ditemui.

#### B. Saran Teoritis

1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan agar dapat mengeksplorasi sumber serta referensi yang digunakan dalam penelitian ini, terutama mengenai Penerapan *E-Government* dalam Perizinan Penyelenggaraan Pos melalui Sistem Informasi Manajemen (SIPPPDIHATI) Direktorat Pos, Kominfo Jakarta Pusat.

2. Bagi peneliti berikutnya diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam terkait Penerapan *E-Government* dalam Perizinan Penyelenggaraan Pos melalui Sistem Informasi Manajemen (SIPPPDIHATI) Direktorat Pos, Kominfo Jakarta Pusat.

